



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS JEMBER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SLAMIN**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR I BIDANG AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN ALUMNI**
3. NHK : **96792**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 905.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 229 m²/200 m² di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
2. Tanah Seluas 229 m² di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 470 m² di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. Tanah Seluas 993 m² di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
5. Tanah Seluas 1552 m² di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
6. Tanah Seluas 1790 m² di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
7. Tanah Seluas 1890 m² di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 308.825.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
2. LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 225.000
3. LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 100.000



4. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2015, HASIL SENDIRI	Rp.	
222.000.000		
5. MOBIL, HONDA STREAM Tahun 2002, HASIL SENDIRI	Rp.	
49.000.000		
6. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI	Rp.	
15.000.000		
7. MOTOR, HONDA F1C02N46L0 AT Tahun 2020, HASIL SENDIRI	Rp.	
Rp. 21.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	58.785.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	538.930.277
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.811.540.277
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.811.540.277

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.